ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI:

Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



AMANDA ANGGITIA ROMDANI

NIM 4318109

Oleh:

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI:

Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



AMANDA ANGGITIA ROMDANI NIM 4318109

Oleh:

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Amanda Anggitia Romdani

NIM

: 4318109

Judul Skripsi

: Analisis Determinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

dengan belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi (Studi

Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018-2020)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Februari 2023 Yang Menyatakan,

Amanda Anggitia Romdani NIM, 4318109

NOTA PEMBIMBING

Novendi Arkham Mubtadi, M. Akun

Jl. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Amanda Anggita Romdani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam *c.q.* Ketua Program Studi Akuntansi Syariah PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Amanda Anggita Romdani

NIM : 4318109

Judul : Analisis Determinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan

Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 02 Februari 2023

Pembimbing,

Novendi Arkham Mubtadi, M.

<u>Akun</u>

NIP.10891103201908001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTÁS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama

Amanda Anggitia Romdani

NIM

4308109

Judul

Analisis Determinan terhadap Kineria Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018-2020)

Dosen Pembimbing

Novendi Arkham Mubtadi, M. Akun

Telah diujikan pada hari Kamis, 06 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun).

Dewan Penguji,

Pen/guji I

Penguji II

M. Aris Safi'l, M.E.I

NIP.198510122015031004

Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si

NIP.199101092020122016

Pekalongan, 06 Juli 2023

RIA Disahkan oleh Dekan,

Shinta Devi Rismawati, SH., M.H.

NIP 197502201999032001

MOTTO

"Pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis" -Aristoteles-

"Keberhasilan bukan dinilai dari apa yang kita mulai, melainkan dari apa yang kita selesaikan"

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

- Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Idoyo dan Ibu Maslihah yang senantiasa memberikan cinta dan kasih saying serta pengorbanan dan selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
- Keluarga besar, Adik, Keponakan, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a nya
- 3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- 4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Novendi Arkham Mubtadi, M. Akun. yang senantiasa memberikan arahan dan bibingan serta do'a sehingga penyusunan Skripsi ini bisa selesai
- 5. Dosen wali Bapak Ade Gunawan, M.M yang senantiasa memberikan arahan dan semangat
- 6. Sahabat seperjuangan "Sayang squad" Hasna Jihan Karima, Nunik Fildzah Roziana, Ningrum Safitri, Wanda Syarolina, Sofa Sabitul Azmi, dan temanteman saya Maulia Khafidhoh, Zunifah yang telah memberkan dukungan dalam menyelesakan skripsi ini.

- 7. Penyemangatku Akbar Maulana dan Maulia Khafidhoh yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
- 8. Kepada seluruh teman-teman saya kelompok 11 KKN Angkatan 51 yang telah melakukan KKN Bersama di Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten pekalongan selama 45 hari.

ABSTRAK

AMANDA ANGGITIA ROMDANI, 2022. Analisis Determinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020)

Penilaian kinerja keuangan instansi pemerintah dilakukan guna untuk mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik, memperbaiki kinerja pemerintahan, memperbaikai komunikasi didalam lingkup kelembagaan serta juga dalam membuat keputusan. Dalam menjalankan kegiatan operasional isntansi, pimpinan akan menciptakan suatu perencanaaan guna mencapai tujuan. Komponen utama dari rencana adalah anggaran. Anggaran adalah suatu unsur dalam suatu sistem pengendalian manajemen yang digunakan dalam bentuk uang untuk melaksanakan suatu rencana dalam jangka waktu tertentu, sehingga memungkinkan para manajer untuk melaksanakan tugas atau organisasi untuk beroperasi lebih efisien dan efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian asosiatif kausal, dengan sumber data menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data denganteknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Sampling Jenuh* atau *Sensus* dengan unit analisis sebanyak 105 unit. Metode analisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS Versi 25.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, (2) dana perimbangan berpengaruh signfikan secara negatif terhadap kinerja keuangan daerah, (3) masa kerja kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, (4) belanja modal dapat memoderasi dengan memperlemah pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah, (5) belanja modal dapat memoderasi dengan memperkuat dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah, (6) belanja modal tidak dapat memoderasi masa kerja terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Desentralisasi, dan Kinerja Manajerial.

ABSTRACT

AMANDA ANGGITIA ROMDANI, 2022. Determinant Analysis of Regional Financial Performance with Capital Expenditures as a Moderating Variable (Empirical Study of Regencies/Cities in Central Java Province in 2018-2020)

Assessment of the financial performance of government agencies is carried out in order to realize accountability to the public, improve government performance, improve communication within the institutional sphere as well as in making decisions. In carrying out institutional operational activities, the leadership will create a plan to achieve goals. The main component of the plan is the budget. Budget is an element in a management control system that is used in the form of money to carry out a plan within a certain period of time, thus enabling managers to carry out tasks or organizations to operate more efficiently and effectively.

This study uses a quantitative approach, with the type of causal associative research, with data sources using secondary data, data collection techniques with documentation techniques. The population in this study is in Regencies/Cities in Central Java Province in 2018-2020. The sampling technique uses Saturated Sampling or Census with 105 units of analysis. The analytical method uses multiple linear regression with the help of SPSS Version 25.

The results of the study prove that (1) regional original income has an effect on regional financial performance, (2) balance funds have a significant negative effect on regional financial performance, (3) regional head tenure has a significant effect on regional financial performance, (4) capital expenditure can moderate by weakening regional original income on regional financial performance, (5) capital expenditure can be moderated by strengthening balance funds on regional financial performance, (6) capital expenditure cannot moderate work period on regional financial performance.

Keywords: Participation in Budgeting, Decentralization, and Managerial Performance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Determinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020)" yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesiakn program studi Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, penulis hendak mengucapkan terimakasi kepada:

- Prof. Dr. Zaenal Mustaqim, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahma Wahid Pekalongan.
- 2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Dr. Tamamudin, M.M, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Pekalongan
- 5. Bapak Novendi Arkham Mubtadi, M. Akun, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini
- 6. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
- 7. Bapak Aris Safi'i, M.E.I dan Ibu Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si selaku dosen penguji
- 8. Kedua orang tua dan sahabat yang selalu memberikan doa dan dukungan.
- Sahabat dan semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan.

Pekalongan, 19 Juni 2023

H...

AMANDA ANGGITIA ROMDANI

NIM. 4318109

DAFTAR ISI

JUDU	JL		i
SURA	AT P	ERNYATAAN KEASLIAN	. ii
NOT	A PE	CMBIMBING	iii
PENO	GESA	AHAN	iv
MOT	TO.		. v
PERS	SEM	BAHAN	vi
ABST	ΓRAI	K v	viii
ABST	ΓRA	CT	ix
KAT	A PE	NGANTAR	. X
DAF	ΓAR	ISI	xii
PEDO	OMA	N TRANSLITERASI	xiv
DAF	ΓAR	TABEL	XX
DAF	ΓAR	GAMBAR	xxi
DAF	ΓAR	LAMPIRANx	xii
BAB	I	PENDAHULUAN	. 1
		A. Latar Belakang Masalah	. 1
		B. Rumusan Masalah	. 8
		C. Tujuan Penelitian	9
		D. Manfaat Penelitian	. 9
		E. Sistematika Pembahasan	10
BAB	II	LANDASAN TEORI	12
		A. Landasan Teori	12
		B. Telaah Pustaka	19
		C. Model Penelitian	25
		D. Pengembangan Hipotesis	25
BAB	III	METODE PENELITIAN	31
		A. Jenis Penelitian	31
		B. Populasi dan Sampel Penelitian	31

		C. Teknik Pengumpulan Data	32
		D. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel	32
		E. Metode Analisis Data	34
BAB	IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
		C. Pembahasan Analisis Data	
BAB	V	PENUTUP	 66
		A. Simpulan	66
		B. Keterbatasan Penelitian	68
		C. Saran	69
		D. Implikasi	69
DAFT	ΓAR	PUSTAKA	 71
LAM	PIR	AN-LAMPIRAN	I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf			
Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	żа	Ġ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
			ha (dengan titik di
ح	Ḥа	ķ	bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
7	Dal	D	De
ذ	Ž al	â	zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ů	Syin	Sy	es dan ye
			es (dengan titik di
ص	Şad	Ş	bawah)
			de (dengan titik di
ض	Даd	d	bawah)
			te (dengan titik di
ط	Ţа	ţ	bawah)
			zet (dengan titik di
ظ	Żа	Ż	bawah)
ع	ʻain	•	Koma terbalik (di atas)
ع غ ف	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
أى	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
_&	На	Н	На
۶	Hamzah	1	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dilambangkan dengan tanda dan harkat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u>-</u>	Fathah	A	A
-	Kasrah	I	Ι
3	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harkat dan huruf.

Tanda	Nama	Huruf	Nama
		Latin	
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah (Vokal Panjang)

Dilambangkan dengan harkat dan huruf, ditransliterasikan dengan huruf dan tanda.

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يا	Fathah dan alif atau	A	a dan garis di
	ya		atas
ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di
			atas

ۇ	Hammah dan wau	U	u dan garis di
			atas

4. Ta'marbuṭah

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh : طفآلُ الأَرَوْضَةُ ditulis raudah al-atfāl.

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Jika pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : وَّ المِنِوَّ المِدِينَةُ ditulis al-Madı̆nah al-Munawwarah

di tulis talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

,ditulis rabbanā رَبُّنَا

ditulis al-birr البرّ

ditulis nazalla نَزَلَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilamlbanhkan dengan huruf yaitu Ji namun dalam trnasliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

- 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
 - Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qomariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.
- 3. Baik huruf Syamsiyah dan Qomariyah kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikuti dan dibandinhkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu - الرَّجُلُ

as-syyidu - السَّيِّدُ

as-symasu - الشَّمْسُ

7. Hamzah

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأُخُذُوْنَ ditulis ta'khużūna,

ditulis inna إِنَّ

ditulis syai'un شَيْءٌ

ditulis akala أكل

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan hruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk meuliskan huruf awal mula diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri didahului oleh kata sandang , maka yang dtulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandangnya.

Contoh:

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

10. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	2
Tabel 2.1 Data Kriteria Kemandirian Kinerja Keuangan	15
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Definisi Operasional Varibel	.33
Tabel 3.2 Kriteria Uji Autokorelasi	35
Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Deskripstif	41
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Metode Kolmogorov-Smirnov	43
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Moderasi	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas metode Glejser	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Moderasi	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda,	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	48
Tabel 4.10 Hasil Uji F (Simultan)	49
Tabel 4.11 Hasil Uji t (Parsial)	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Interaksi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Ragan Model Penelitian	25
Gainbar 2.1 Dagan Woder i chemian,	<i></i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Populasi dan Sampel	1
Lampiran 2	Hasil Uji Asumsi Klasik	VIII
Lampiran 3	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	XII
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	XIV

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerah nya secara mandiri. Lembaga pemerintah tiap negara memiliki peran dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat yang secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan otonomi pada suatu daerah (Sujarweni, 2015).

Penetapan otonomi daerah menjadi perwujudan dan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Penerapan desentralisasi menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah salah satunya untuk mengukur kinerja keuangan daerah (Wahyudin & Hastuti, 2020).

Kinerja keuangan merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu pemerintahan. Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian yang digambarkan memalui tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekster. Rasio kemandirian daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegitan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Ariwibowo, 2015). Berikut data tabel 1.1 kinerja keuangan yang dilihat dari rasio kemandirian dari tahun 2018-2020:

Tabel 1.1

Data kinerja keuangan di ukur dengan rasio kemandirian daerah

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

	Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian			
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	
Kabupaten Banjarnegara	11,37	12,24	11,96	
Kabupaten Banyumas	19,83	19,99	20,07	
Kabupaten Batang	13,96	13,89	14,85	
Kabupaten Blora	8,92	11,02	14,08	
Kabupaten Boyolali	15,32	16,77	18,95	
Kabupaten Brebes	14,01	12,24	13,05	
Kabupaten Cilacap	17,17	17,49	18,76	
Kabupaten Demak	15,97	12,25	18,84	
Kabupaten Grobogan	12,94	13,35	13,86	
Kabupaten Jepara	16,37	15,95	18,11	
Kabupaten Karanganyar	16,23	17,79	18,13	
Kabupaten Kebumen	13,33	14,52	14,58	
Kabupaten Kendal	15,70	15,72	16,78	
Kabupaten Klaten	15,36	11,59	12,79	

24,08	16,45	19,04
12,44	16,19	13,85
13,77	12,82	13,96
14,81	15,64	20,95
		13,41
		16,06
		14,07
		17,39
		20,01
		17,83
		23,01
		16,59
		16,79
		12,06
		13,39
		30,73
		24,12
		24,66
		46,01
		26,91
		26,19
		18,62
	12,44	12,44 16,19 13,77 12,82 14,81 15,64 12,37 13,29 14,51 14,74 14,00 12,91 17,03 16,93 18,11 18,56 15,38 16,01 21,11 21,39 16,91 15,82 14,56 14,82 11,79 11,76 12,25 12,17 27,52 28,27 19,79 21,89 23,47 25,44 44,66 45,26 28,09 28,06 27,86 27,54

Keterangan:

- 1. RendahSekali 0% 25%
- 2. Rendah 25% 50%
- 3. Sedang 50% 75%
- 4. Tinggi 75% 100%

Sumber: Data yang diolah, 2022

Dari tabel 1.1 menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 yang diukur dengan rasio kemandirian sangat rendah sekali karena tidak ada satupun Kabupaten/Kota yang rasio kemandiriannya melebihi 50%. Hal ini tentunya

akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah dimana sangat bergantung nya pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Angelina, dkk 2020)

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu pada pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Pendapatan asli daerah mencerminkan kemandirian daerah, karena pemerintah daerah memiliki lebih banyak kebebasan untuk menggunakan pendapatan asli daerah nya dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Oleh karena itu dalam rangka memperluas keuangan daerah, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pertumbuhan pendapatan asli daerah yang meningkat dapat mengindikasikan kinerja keuangan yang baik (Mohammed, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan Lathifa& Haryanto (2019) pendapatan asli daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian ini pendapatan asli daerah dapat mendongkrak pertumbuhan pendapatan di daerah, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah pemerintah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan lebih mampu mengelola keuangan daerahnya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mulyani dan Wibowo (2017) yang

menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan semakin tidak efisien.

Dana perimbangan merupakan faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu pendapatan lain yang memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur APBD. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwasannya dana perimbangan ialah dana yang sumbernya dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan memegang peran penting terutama dalam mencapai efisiensi dan pemerataan dalam pemberian pelayanan publik. Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dimana dana yang diterima dari pemerintah pusat menunjukan bahwa pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerah. Hal ini akan mengurangi kapasitas keuangan pemerintah daerah (Maulina, 2021).

Penelitian yang dilakukan Fatmawati (2019) menyatakan bahwa suatu dana perimbangan memberi pengaruh yang positif pada kinerja keuangan di pemerintahan. Dalam penelitiannya tersebut diperlihatkan dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah menunjukan keterkaitan yang bisa dikatakan sangat kuat. Berlainan dengan penelitian yang dilakukan Andaresta (2021) menunjukan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh yang negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Bisa diartikan besarnya

penyaluran dana perimbangan dari pusat ke daerah akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah bertanggung jawab atas segala perencanaan dan pelaksanaan dari program pemerintah. Menurut PP Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 mengenai pengalokasian keuangan daerah dimana kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pada pengelolaan keuangan daerah yang memiliki wewenang dalam merealisasikan keseluruhan pengelolaan APBD. Masa jabatan seseorang mempengaruhi kinerjanya, dengan jam kerja yang lebih panjang kepala daerah dapat belajar dari pengalaman beberapa tahun terakhir terutama dalam mengelola APBD dengan baik (Sitorus, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tama& Adi(2018) menunjukan bahwa masa kerja memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kineraj kauangan pemerintah daerah di Jawa. Penelitian ini menegaskan bahwa semakin lama masa jabatan kepala daerah akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerahnya, hal ini karena adanya keterkaitan masa kerja dengan pengalaman kerja yang diperoleh seseorang.

Adanya *research gap* terhadap penelitian sebelumnya terkait diatas, maka didalam penelitian yang dilakukan ini mencoba mengkaitkan dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan di daerahnya, dimana bisa berupa infrastruktur, yang terlihat jelas memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja dan juga pertumbuhan perekonomian yang

ada disuatu daerah yang bersangkutan. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung bisa diharapkan akan memantik tumbuhnya perekonomian dalam hal ini meningkatnya suatu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada disuatu daerah yang bersangkutan. Besarnya suatu PAD mengartikan bahwasannya pemerintah daerah didalam melakukan suatu belanja daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing juga bertambah besar hal ini dikarenakan suatu dana yang dipergunakan untuk pengalokasian ke belanja modal sumbernya dari PAD, dana perimbangan dan pendapatan sah yang lain (Sugiono, 2014).

Pendapatan berimplikasi daerah menurun akan pada yang pengalokasian belanja modal, hal ini karena pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap perolehan pemasukan. Alokasi belanja modal sama hal nya akan berimplikasi pada dana perimbangannya, hal ini karena sampai pada saat ini pemerintah daerah hanya bisa menutupi belanja daerah dengan memanfaatkan pendapatan asli daerah yang masih bisa dikatakan rendah atau terbilang kecil. Pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik semestinya memerlukan dukungan berupa sarana dan juga prasarana yang mana didalam hal ini guna mendukung segala kegiatan yang dijalankannya (Sitorus, 2016).

Belum banyaknya penelitian yang terkait dengan kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah maka dalam penelitian ini akan menguji kembali hubungan antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, masa kerja kepala daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi terhadap

kinerja keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel belanja modal sebagai variabel moderasi yang digunakan pada penelitian (Digdowiseiso dll, 2022) dan (Lathifa, 2019) sebagai variabel independen. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Determinan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020"

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah ini yakni:

- 1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Daerah?
- 2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Daerah?
- 3. Apakah masa kerja Kepala Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Daerah?
- 4. Apakah belanja modal mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Daerah?
- 5. Apakah belanja modal mampu memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Daerah?
- 6. Apakah belanja modal mampu memoderasi pengaruh masa kerja Kepala Daerah terhadap kinerja keuangan Daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, yakni:

- Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Daerah.
- Untuk menganalisispengaruh dana perimbangan (DP) terhadap kinerja keuangan Daerah.
- 3. Untuk menganalisis pengaruh masa kerja Kepala Daerah terhadap kinerja keuangan Daerah.
- 4. Untuk menganalisis kemampuan belanja modal (BM) dalam memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Daerah.
- 5. Untuk menganalisiskemampuan belanja modal (BM) dalam memoderasi pengaruh dana perimbangan (DP) terhadap kinerja keuangan Daerah.
- 6. Untuk menganalisis kemampuan belanja modal (BM) dalam memoderasi pengaruh masa kerja Kepala Daerah terhadap kinerja keuangan Daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan masyarakat yang ingin berperan aktif dalam pengawasan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai wujud otonomi daerah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengukuran kinerja agar lebih komprehensif dan dapat dijadikan alternatif masukan untuk mengukur kinerja keuangan melalui aspek kemandirian.

E. SISTEMATIKA PENEKITIAN

Sistematika penulisan pada skripsi ini dibagi mejadi lima bab, dengan format penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

berisikan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan serta manfaat penelitiannya. Hal tersebut ditempatkan di bagian awal skripsi agar dapat dipahami apa yang mendasari peneliti dalam melakukan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Terdapat Landasan Teori yang isinya teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. Teori perlu ditempatkan di bagian awal setelah pendahuluan agar dapat dipahami teori apa yang akan diuji dan verifikasi dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat Metode Penelitian, dimulai dari jenis dan pendekatan penelitian hingga metode analisis data. Metode penelitian dijelaskan setelah Pendahuluan dan Landasan Teori agar dapat dimengerti mengenai metode pengambilan dan pengujian data dari teori setelah dikaji dengan permasalahan yang ada pada Pendahuluan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Terdapat Analisis dari data yang telah didapatkan menggunakan teknik yang dijelaskan pada metode penelitian serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang sudah diuji. Analisis dan Pembahasan mengenai data dan hasil penelitian ditempatkan di bagian akhir sebelum penutup agar dapat dipahami dan juga dipakai sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bagian paling akhir yaitu bab V terdapat Penutup dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian hingga saran bagi para peneliti selanjutnya. Penutup ditempatkan pada bagian paling akhir karena berisikan rangkuman hasil yang didapat pada penelitian ini, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penelitin dapat menyimpulkan dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang sudah diuraikan dari "Analisis Determinan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020" dapat disimpulkan bahwa;

- 1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Karena pendapatan asli daerah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat pendapatan asli daerah sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggung jawab, serta dapat berperan penting dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah suatu daerah, semakin kecil kemungkinan pemerintahan daerah akan mengalami kesulitan keuangan dalam pendanaan infrastruktur bagi pembangunan pemerintah daerah bersangkutan.
- 2. Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk

membiayai kelebihan belanja daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat telah memberi wewenang kepada peerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya dengan maksud agar pendapatan asli daerah bisa meningkat dan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa berkurang. Semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintahan daerah bergaantung kepada pemerintah pusat yang menunjukan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun dan begitu juga sebaliknya.

- 3. Masa kerja kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Kepala dearah dengan masa jabatan yang panjang cenderung memiliki perspektif yang terbatas serta menghindari adanya perubahan secarara dikal. Dengan masa jabatan yang panjang kepala daerah akan lebih menguasai dalam proses pengambilan keputusan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang lebih tentang tugasnya.
- 4. Belanja modal tidak dapat memoderasi dengan memperlemah pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Kemungkinan belanja modal tidak mampu memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan daerah dikarenakan total realisasi pendaatan asli daerah pemerintahan kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah belum maksimal dan cenderung kecil sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal juga relative sedikit.

- 5. Belanja modal dapat memoderasi dengan memperkuat perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya semakin besar dana perimbangan akan menambah kemandirian daerah pada periode berikutnya dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendongkrak perekonomian.
- 6. Belanja modal tidak dapat memoderasi masa kerja kepala daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Dikarenakan pengalokasian anggaran belanja modal dalam APBD terkadang tidak didasarkan pada prioritas anggaran dengan demikian belanja modal digunakan untuk kepentingan politis. Pada kenyataannya, praktik penganggaran belanja modal di pemerintahan daerah cenderung bersinggungan dengan korupsi oleh para pembuat keputusan anggaran.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Walaupun penelitian telah dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan pedoman dan panduan, masih terdapat keterbatasan yang dimiliki peneliti;

- Penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu yang terbatas dan hanya untuk membuktikan kondisi yang terjadi pada waktu penelitian.
- Penelitian ini hanya berdasarkan data sekunder saja sehingga data yang diolah terbatas dikarenakan hanya berdasarkan data yang di publikasikan dan dapat diakses oleh publik.

3. Penelitian ini hanya memakai 3 variabel bebas saja, seharusnya masih ada penyebab lain yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

C. Saran

Selanjutnya, berdasarkan temuan penelitian, peneti telah membuat saran:

- 1. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa menambahkan lebih banyak variabel independen selain yang ada pada penelitian yang dilakukan ini, atau melakukan studi yang menggunakan variabel lain sebagai pemicu yang belum pernah digunakan sebelumnya, yang akan berdampak lebih besar pada kinerja keuangan pemerintah.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa menambah ruang lingkup dalam melakukan penelitian yang tidak hanya kategori pemerintah desa tetapi juga lebih dari itu, dan dapat menambah waktu yang dalam melaksanakan penelitian guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan lebih akurat dalam jangka panjang.

D. IMPLIKASI

1. Implikasi teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam memahami pengetahuan tentang pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan masa kerja kepala daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang berpengruh terhadap kinerja keuangan daerah dan terdapat dua variabel independen yang dapat dimemoderasi terhadap belanja modal, yaitu pendapatan asli

daerah, masa kerja kepala daerah serta pendapatan asli daerah yang dimoderasi belanja modal dan serta dana perimbangan yang dimoderasi belanja modal.

2. Implikasi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa implikasi praktis bagi institusi daerah Kabupaten/Kota dalam mengawasi kinerja keuangan daerahnya. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran akan pentingnya aspek kemandirian dalam mengembangkan suatu pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaresta, Helen, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624.
- Andirfa, Mulia, dkk. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5, 30–38.
- Angelina, N. & dkk. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 4, 2747–0067.
- Antari, N. P. G. S. & I. B. P. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7, 1080–1110.
- Ariwibowo, T. (2015). Pengaruh dana perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 11, 335–344.
- Ayuningsih, A. (2016). Pengaruh Karakterristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Online STIE PGRI Dewantara*, *XI*, 87–101.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Erlangga.
- Fatmawati, A. P. & O. C. D. P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terghadap Kinerja keuangan Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivarate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Hardikriyawan, A. (2012). Pengaruh pelatihan dan Masa Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo). *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.

- Harjito, yunus, D. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Feb. UN PGRI Kediri*, 5, 2541–0180.
- Jogiyanto. (2004). *Metode Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Prngalaman*. Universitas Gajahmada.
- Julitawati, D. & J. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1, 15–29.
- Junarwati, D. (2013). pengaruh Pengaruh Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6, 186–193.
- Kurniawan, K. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau. Universitas sumatra Utara Medan.
- Lathifa, H. & H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun2013-2017. *Diponegoro Jurnal Of Accounting*, 8, 2337–3806.
- Maulina, Afia, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 5.
- Misdi. (2015). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. digilib.uns.ac.id.
- Mohammed, Abba, D. (2015). Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An analysis Of Local Governments in adamawa Stage, Nigeria. *Journal Of Arts, Science & Commerce*, 6, 67–77.
- Muda, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating. Universitas Sumatra Utara Medan.
- Mulyani, S. & H. W. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2012-2015. XV.
- Mustanda, S. &. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8, 4759–4787.
- Nugroho, F. & A. rohman. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Diponegoro Jurnal Of Accounting, 1, 1–14.
- Pasoloran, O. (2001). Teori Stewardship:Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 419–432.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prayitno, S. (2012). Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Surakarta.
- Rahmawati, N. K. E. & I. W. P. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 1767–1795.
- Saraswati, D. & Y. S. rioni. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9, 2087–4669.
- Sari, N. M. D. P. & I. K. M. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8, 4759–4787.
- Sastrohadiwiryo, S. (2002). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Bumi Aksara.
- Setianingrum, R. D. & haryanto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9, 1–15.
- Setyawan, B. & A. P. (2008). Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. *Simposium Nasional Riset*

- Ekonomi & Bisnis Asosiasi Perguruan Tinggi Tiongkok.
- Simatupang, P. (2017). Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatra Selatan. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Sitorus, F. J. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara). Universitas Sumatra Utara Medan.
- Sugiono, S. (2014). Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah. Universitas Negri Surabaya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. Ke-De). ALFABETA.
- Sumual, Christian, D. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12, 782–791.
- Susanti, R. (2014). Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris: Pemerintah Daerah Kab/Kota di Indonesia). Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Susilawati, P. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tama, I. G. M. A. A. & P. H. A. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. 1, 91–113.
- Wahyudin, I. & H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1, 86–97.
- Yulia, A. D. . & N. P. S. H. M. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14, 1924–1950.